

# DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT (PADA PERIODE 2000-2019)

Yogie Kurniawan<sup>1)</sup>, Evi Susanti Tasri<sup>2)</sup> & Kasman Karimi<sup>3)</sup>

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email : [yogi.kurniawan731@mail.com](mailto:yogi.kurniawan731@mail.com), [evitasri@bunghatta.ac.id](mailto:evitasri@bunghatta.ac.id), [kasman.karimi@yahoo.com](mailto:kasman.karimi@yahoo.com)

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan yang masih besar menjadi tantangan pembangunan yang di hadapi Indonesia. Persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang serius karena konsekuensi yang ditimbulkannya. Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan juga mengakibatkan jutaan anak-anak tidak bias memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan rakyat untuk membiayai layanan kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses layanan public, kurangnya lapangan kerja, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, serta menguatnya arus migrasi ke kota [1]

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting untuk memberantaskan kemiskinan, karena pertumbuhan merupakan suatu gambaran adanya perkembangan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu faktor suatu bangsa untuk memajukan bangsanya atau menaikkan kesejahteraan bangsanya. Perekonomian bisa dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Ketika perekonomian suatu Negara mengalami peningkatan berarti terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sebaliknya ketika perekonomian itu tidak berkembang maka terjadinya permasalahan perekonomian dan sosial [2]

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, pariwisata, dan lain-

lain. Akan tetapi pemerataan pembangunan masih belum merata di setiap kabupaten di Sumatera Barat, masih banyak ketimpangan pendapatan yang perlu diperbaiki. Usaha dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari akar permasalahan yang terjadi disuatu daerah, salah satunya adalah ketenagakerjaan yang perlu penanganan serius yaitu kualitas kerja yang masih relatif rendah, permasalahan upah atau pendapatan tenaga kerja yang masih rendah serta masih terjadinya ketimpangan sektoral tenaga kerja [3].

## B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2000 sampai dengan 2019. Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Faktor yang digunakan untuk mempengaruhi perubahan kemiskinan adalah product domestic regional bruto, pengangguran, angka partisipasi sekolah dan jumlah penduduk. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda (OLS) yang diolah dengan menggunakan Eviews. 9.0. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t-statistik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (OLS\_ yang diolah dengan menggunakan bantuan program Eviews 9.0. Model data yang digunakan adalah time series sehingga penggunaan analisis regresi dianggap lebih tepat Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Ringkasan Estimasi Pengujian Hipotesis**

<b>Keterangan</b>	<b>Koefisien Regresi</b>	<b>t-stat</b>	<b>Prob</b>	<b>Cut Off</b>	<b>Kesimpulan</b>
(Constanta)	-54.514	-1.396	0.1847		
PDRB	-0.043	-0.110	0.9140	0.05	Tidak Signifikan
PGG	0.299	2.207	0.0445	0.05	Signifikan
APS	-0.146	-3.204	0.0064	0.05	Signifikan
JP	3.965	2.053	0.0593	0.05	Signifikan

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian hipotesis menunjukkan product domestic regional bruto, pengangguran, angka partisipasi sekolah dan jumlah penduduk mampu berkontribusi mempengaruhi perubahan kemiskinan di Sumatera Barat hingga mencapai 86.70%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian saat ini

Pada tahapan pengujian hipotesis ditemukan pengangguran, angka partisipasi sekolah dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ( $P < 0.05$ ). Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis terlihat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, angka partisipasi sekolah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan .

Selain itu pada proses oengujian ditemukan bahwa product domestic regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumaera Barat ( $P > 0.05$ ). Dengan demikian product domestic regional bruto bukanlah variabel yang mempengaruhi kemiskinan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Keadaan tersebut menunjukkan adanya variabel lain yang terdapat diluar model yang juga mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Barat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan pengangguran, angka partisipasi

sekolah dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, selain itu pada proses oengujian ditemukan bahwa product domestic regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumaera Barat.

Sesuai dengan hasil yang diperoleh maka disarankan bagi pemerintah daerah terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, karena ketika ekonomi daerah mengalami peningkatan maka lapangan pekerjaan akan terbuka, Investasi pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri hingga aglomerasi mendorong diyakini akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Sumatera Barat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih banyak kepada ibu Dr. Evi Susanti Tasri S.E, M.Si selaku pembimbing I dan kepada bapak Kasman Karimi S.E, M.Si selaku pembimbing II. Beliau selalu sabar dan memberikan arahan dan saran yang sangat dibutuhkan penulis dalam penulisan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M. Todaro, "Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga," *Ed. Kedelapan. Jakarta Penerbit Erlangga*, 2006.
- [2] M. Kuncoro, *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Erlangga, 2004.
- [3] M. Ahadismal, M. Salam, and I. M. Benyamin, "Disparitas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan," *Perenc. Pengemb. Wil. Unhas*, vol. 6, no. 2, 2011.

